

Judul : MKD Jangan Mempersulit Pergantian
Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

MKD Jangan Mempersulit Pergantian

Pergantian Ketua DPR bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu berdasarkan keputusan MKD dan ditarik partai politik atau digantikan kader lain.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) perlu segera merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam komposisi pimpinan dewan. Fungsi MKD sebagai penjaga kehormatan dewan perlu ditegaskan dengan mempercepat proses pergantian Ketua DPR.

"Proses di MKD jangan sampai mempersulit. Jangan hanya melihat secara normatif, tapi harus ingat kredibilitas DPR saat ini sudah hancur lebur," kata pakar hukum tata negara dari UGM, Oce Madril, kemarin.

Menurutnya, langkah cepat perlu segera dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Roh UU MD3 itu menjaga muara kredibilitas DPR. Kerja-kerja MKD harus diarahkan untuk mencapai tujuan itu,"

tegasnya.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM itu berharap MKD mengurangi perdebatan teknis perihal pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR. MKD harus berani mengambil keputusan demi memulihkan citra DPR.

"Kalau MKD berbelit-belit, nanti dinilai tidak menjadi majelis kehormatan, tapi justru akan meruntuhkan kehormatan dewan," ujarnya.

Berkenaan dengan hal itu, MKD kemarin memutuskan untuk membatalkan rapat konsultasi dengan seluruh pemimpin fraksi untuk membahas nasib Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, keputusan itu diambil lantaran banyak pemimpin fraksi berhalangan hadir. "Supaya hasilnya maksimal, jadi kami tunda," jelasnya.

Selain melalui MKD, pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan keputusan Golkar mencopot penugasan Setya Novanto sebagai Ketua DPR sudah cukup sebagai dasar pergantian. "Pergantian Ketua DPR itu bisa dilakukan partainya dengan ditarik dan mengajukan nama baru untuk duduk sebagai pimpinan DPR," katanya.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR, antara lain Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan

Aziz Syamsudin. Namun, pihak Golkar belum mengonfirmasi perihal wacana tersebut.

Dasar hukum

Pasal 87 ayat (1) UU MD3 menyatakan pimpinan DPR bisa berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Di Pasal 87 ayat (2), pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh MKD DPR.

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya.

f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU MD3.

g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mtvn/P-3)



Idrus Marham

Lahir
Pinrang, 14 Agustus 1962
Jabatan
Sekjen Partai Golkar
Pendidikan
Doktor Ilmu Politik UGM

Karier Politik

1997-1999
Anggota MPR RI
1999-2014
Anggota DPR RI
2014-sekarang
Sekjen Partai Golkar



Yahya Zaini

Lahir
Bawean, 24 April 1964
Jabatan
Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik Partai Golkar
Pendidikan
Sarjana Hukum
Universitas Airlangga

Karier Politik

1998-2004
Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Golkar
2004-2006
Anggota DPR RI
2016-sekarang
Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik Partai Golkar

Calon Ketua Umum Partai Golkar

- Aziz Syamsuddin (Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah)
- Airlangga Hartarto (Koordinator Bidang Perekonomian)
- Bambang Soesatyo (Ketua Bidang Pemerintahan Pemilu Wilayah Jawa II)

Sumber: Partai Golkar/Tim MI Foto: MI/ROMMY/ANTARA/Grafi: CAKSONO